

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD
GOVERNANCE* PADA *WEBSITE* DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

Mirfasya Bijanah Putri, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Pengarang : Mirfasya Bijanah Putri

NIM : 2102016067

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP 197411202005011001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1260-1274

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA *WEBSITE* DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

Mirfasya Bijanah Putri ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi prinsip-prinsip good governance yang terdapat pada website Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan sembilan prinsip good governance menurut UNDP yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis yang tercermin dalam penyajian konten dan pengelolaan informasi pada website. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan metode analisis semiotika Charles Sanders Pierce. Teori ini menitikberatkan pada segitiga makna yang terdiri atas representasi, objek, dan interpretasi, untuk mengungkap makna tanda-tanda visual maupun tekstual yang muncul pada website. Analisis diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pihak pemerintah selaku pengelola website dan masyarakat sebagai pengguna, guna memperoleh interpretasi yang komprehensif mengenai penerapan prinsip good governance dalam praktik digital pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah berupaya merepresentasikan Sebagian besar prinsip good governance. Namun, pada prinsip berorientasi pada kesepakatan tidak direpresentasikan karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah. Selain itu, implementasinya masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, serta belum optimalnya website. Secara umum, website ini telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis digital, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dari segi pengelolaan dan pemerataan akses informasi.

Kata Kunci : *Good Governance, Dinas Perdagangan, Website Pemerintah, Semiotika Charles Sanders Pierce*

Pendahuluan

Penerapan *good governance* menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menangani dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dapat dialami melalui perkembangan TIK. Dinamika yang terjadi mengharuskan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ipamirfa58@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pemerintah siap dalam menciptakan inovasi pemerintahan dari yang bersifat manual menjadi digital agar penyebarluasan informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada publik. Hal tersebut sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Penerapan *e-government* sudah dijalankan Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui penerapan *website* dengan domain <https://disdag.samarindakota.go.id/>.

Fenomena yang terjadi bahwa makna yang terkandung dalam penerapan *good governance* pada *website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda masih belum berjalan secara optimal. Penyediaan data dan informasi yang disajikan masih belum lengkap. Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat kaitan antara *good governance* dengan *e-government*. *E-government* merupakan wujud asli dari perubahan paradigma manajemen pemerintah dengan istilah *bad governance* ke *good governance*. Paradigma manajemen pemerintah lama, dalam menyediakan informasi masih tergolong lambat, tidak adil, tidak responsif, kompleks, tidak transparan, dan memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan praktik KKN sehingga sejalan dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* (Napitulu, dkk.,2020). Selain itu, terdapat kaitan anatara analisis semiotika dan *good governance*. Semiotika merupakan kajian ilmu dengan menafaatkan makna pada suatu tanda. Semiotika menurut pemikiran Charles Sanders Pierce menggambarkan hubungan tanda dengan tiga elemen dasar semiotika yaitu tanda, objek, dan interpretasi (Fatimah, 2020).

Tujuan penerapan analisis semiotika dalam prinsip-prinsip *good governance* pada *e-government* agar dalam menyediakan informasi kepada publik dapat berjalan lebih baik melalui pemanfaatan TIK. Semiotika digital memaksudkan bagaimana tanda dan simbol digunakan dalam konteks digital (Sulianta, 2024). *Good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik (Khairudin, dkk.,2021). *E-government* adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (Khairudin, dkk.,2021).

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan semiotika Charles Sanders Pierce berupa tanda, objek, dan interpretasi berdasarkan indikator dari sembilan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP agar dapat menjelaskan makna yang terkandung di dalam *website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Peneliti berpendapat bahwa masalah ini penting diteliti karena, selain menganalisis dan mendeskripsikan makna yang terkandung pada *website*, sekaligus mencari tahu faktor-faktor apa yang menghambat penerapan *good governance* pada *website*, sehingga dapat memberikan informasi kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui rekomendasi agar makna *good governance* dapat diterapkan di dalam *website* secara optimal.

Kerangka Dasar Teori

Governance

Governance merupakan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, pemenuhan kewajiban, serta menjadi penghubung ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka (Ilham, 2021). Kelahiran teori *governance* pada tahun 1990-an yang diawali oleh pergeseran nilai-nilai dalam organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip organisasi swasta melalui paradigma NPM (Danar, 2022). *Good governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam suatu usaha kolektif (Rohman, 2009).

Prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan UNDP ada sembilan, yaitu: (1).Partisipasi: Setiap masyarakat memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan; (2).Aturan Hukum: Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan peraturan hukum yang jelas; (3).Transparansi: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan pemerintah memiliki nilai yang sangat penting; (4).Daya Tanggap: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berupaya untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan; (5).Berorentasi pada Kesepakatan: Setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah, agar dapat memenuhi kepuasan semua pihak atau sebagian besar pihak, serta menjadi keputusan yang mengikat dan dimiliki bersama; (6).keadilan: kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan memastikan bahwa setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka; (7).Efektivitas dan Efisiensi; proses pemerintahan dan lembaga mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal; (8).Akuntabilitas: pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat tersebut; (9).visi strategis: pandangan strategis dalam menghadapi masa depan (LAN dalam Mangindaan, 2017).

E-Government

E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan (Indrajit dan Eko, 2022). Terdapat beberapa tahapan dan mekanisme perkembangan *e-government* secara umum, yaitu: (1).Penampilan *Website*: Segala informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat tersedia di *website* pemerintah; (2).Interaksi: Informasi lebih beragam, seperti fasilitas yang dapat diinteraksi; (3).Transaksi: *Website* menyediakan aplikasi atau formulir bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara *online*; (4).Transformasi: Terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah (Aksenta, dkk., 2023).

Website

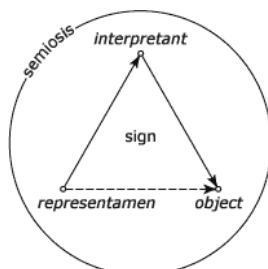
Situs *web* merupakan kumpulan halaman *web* yang saling berhubungan dengan topik tertentu, sering kali dilengkapi dengan file gambar, video, atau jenis file lainnya (Azis, 2012). *Website* merupakan kumpulan halaman *web* yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait (Andika dan Wulandari, 2021). Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* bahwa pemerintah dalam memanfaatkan TIK agar pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi tersalurkan secara cepat dan akurat, sehingga diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* agar menciptakan *good governance* di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE.

Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan kanal resmi dengan domain <https://disdag.samarindakota.go.id/> untuk dapat memberikan informasi mengenai urusan perdagangan yang ada di Kota Samarinda. *Website* ini memiliki menu pada bagian atas *website* yaitu Webmile, Hotline/Pengaduan, dan E-Panel. Selain itu, terdapat menu utama berupa Beranda, yang di dalamnya terdapat menu Berita, BAPOKTING, Kepegawaian, Newsboard, Produk dan Layanan, dan Pusat Oleh-Oleh. Menu lainnya yaitu Profil, Produk dan Layanan, Media, PPID Pelaksana, Meteorologi, dan BAPOKTING.

Semiotika

Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *semeion* yang berarti tanda (Pilian dalam Pambudi, 2023). Era modern menciptakan semiotika digital, sebagaimana tanda digunakan serta ditafsirkan dalam konteks digital (Sulianta, 2024). Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, yang dimana tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif (Tinarbuko dalam Pambudi, 2023).

Semiotika lahir dari pemikiran yang hadir dari tokoh-tokoh semiotika. Tokoh-tokoh semiotika terkenal dengan aspek-aspek fundamental yang memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu tersebut berdasarkan ranah pemikiran untuk memecahkan fenomena atau permasalahan sosial (Rorong, 2024). Salah satu tokoh semiotika yaitu Charles Sanders Pierce yang terkenal tentang logika hubungan dan pragmatisme sebagai metode penelitian, pendekatan Pierce terhadap semiotik filsafat sebagai disiplin interaktif dan eksperimental yang disebut sebagai "filsafat laboratorium", mencerminkan tema-tema penting pada karyanya dengan mengambil makna sebuah konsep bergantung pada bantalan praktisnya, sehingga pemikiran Pierce bahwa relasi tanda adalah kuncinya (Fatimah, 2020).



Gambar 1. Model Segitiga Pierce (Sumber: Fatimah, 2020)

Semiotika Pierce menggambarkan hubungan tanda dengan tiga elemen dasar semiotika, yaitu: 1.Representasi: Bentuk fisik atau yang dapat diterima oleh panca indera berupa kualifikasi, tanda tunggal, dan tanda hukum; 2.Objek: Sesuatu yang dirujuk tanda, dapat berupa materi yang diterima oleh panca indera atau bersifat mental maupun imajiner berupa ikon, indeks, dan simbol; 3.Interpretasi: Menurut hakikat berupa *rheme*, *dicent*, dan *argument*. Model segitiga Pierce menunjukkan bahwa setiap titik saling terhubung dengan garis dua arah, yang berarti setiap istilah hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip *good governance* pada *website* dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Pierce. Fokus penelitian diukur berdasarkan sembilan indikator prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP, yaitu Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi pada Kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis (Lan dalam Mangindaan, 2017). Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dengan tahapan persiapan, pengumpulan data, dan analisis berdasarkan jadwal penelitian.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder (Kusumastuti dan Khoiron, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu ASN Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang mengelola *website* dan masyarakat sebagai pengguna *website*. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, buku, jurnal, dan arsip tertulis yang berkaitan dengan *website* sebagai objek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fiantika, 2022). Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis semiotika Charles Sanders Pierce dengan menggunakan tiga tahap analisis berupa representasi, objek, dan interpretasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda

1. Partisipasi

KIRIM KRITIK & SARAN UNTUK KAMI

Nama	Nama Anda...
Telepon	Nomor Telepon Anda...
Email	Email Anda...
Pesan	Isi Pesan...
Kirim	

Gambar 2. Representasi Prinsip Partisipasi pada Menu Hotline/Pengaduan di Bagian Atas *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Representasi prinsip partisipasi terdapat pada bagian atas halaman *website* melalui menu "Hotline/Pengaduan". Fitur ini tersedia dalam bentuk formulir "Kirim Kritik dan Saran untuk Kami" yang terdiri atas beberapa kolom yang dapat diisi, berupa Nama, Telepon, Email, dan Pesan. Setelah kolom diisi, masyarakat dapat mengirimkan dengan menekan tombol "kirim" yang berada di bawah formulir.

PENGADUAN

Nama	Nama Anda...
Telepon	Nomor Telepon Anda...
Email	Email Anda...
UTTP SPBU	SPBU Kebaktian
Pesan	Isi Pesan...
Kirim	

Gambar 3. Representasi Prinsip Partisipasi pada Submenu Pengaduan di dalam Menu Metrologi (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada bagian atas halaman *website* melalui menu "Hotline/Pengaduan", representasi prinsip partisipasi juga terdapat pada submenu "Pengaduan" di dalam menu "Metrologi". Fitur ini tersedia dalam bentuk formulir "Pengaduan", namun fitur ini memiliki sedikit perbedaan yaitu terdapat tambahan kolom berupa UTTP SPBU.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya keberadaan fitur pengaduan di dalam *website*. Namun, *website* belum merekam jumlah pengguna yang mengakses *website*. Selain itu, penerapannya belum berjalan secara optimal, karena masyarakat belum pernah menggunakan fitur pengaduan tersebut melalui *website*. Sehingga, perlu dioptimalkan agar mendorong keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi penggunaan *website*, menetapkan mekanisme baku dalam memberikan respon, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *website*, agar masyarakat dapat secara aktif memanfaatkan fitur partisipasi tersebut.

2. Aturan Hukum

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda

Gambar 4. Representasi Prinsip Aturan Hukum pada Submenu Tentang Dinas Perdagangan di dalam Menu Profil (Sumber: *Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025*)

Representasi prinsip aturan hukum terdapat pada submenu "Tentang Dinas Perdagangan" di dalam menu "Profil". Di dalam menu menampilkan empat poin hukum. Namun, tampilan pada menu ini hanya berupa teks tanpa tombol unduh. Selain itu, tidak terdapat penjelasan sederhana mengenai aturan hukum yang ditampilkan tersebut.

Dasar Hukum

Oleh: Novyanto Rahmadi • Terakhir diperbarui: 1 tahun yang lalu

[Like](#) [Share](#) [Tweet](#)

Undang-undang Republik Indonesia (2)

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Download](#)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Download](#)

Peraturan Pemerintah (1)

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Download](#)

Peraturan Komisi Informasi (2)

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik [Download](#)
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [Download](#)

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (1)

- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah [Download](#)

Peraturan Wali Kota (1)

- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda [Download](#)

Keputusan Wali Kota (2)

- Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda [Download](#)
- Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda [Download](#)

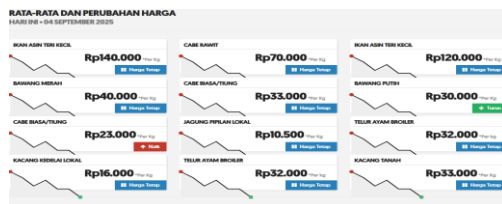
Gambar 5. Representasi Prinsip Aturan Hukum pada Submenu Dasar Hukum di dalam Menu PPID Pelaksana (Sumber: *Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025*)

Selain pada submenu "Tentang Dinas Perdagangan" di dalam menu "Profil", representasi prinsip aturan hukum juga terdapat pada submenu "Dasar Hukum" di dalam menu "PPID Pelaksana". Menu ini menampilkan berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pada menu ini terdapat tombol "unduh", namun tombol tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, tampilannya hanya berupa teks tanpa penjelasan sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Pemerintah telah menampilkan aturan hukum pada *website* yang didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan. Namun, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa tidak menemukan aturan hukum di dalam *website*, dikarenakan sulit untuk mencari aturan hukum tersebut dan lebih mengutamakan kebutuhan utama mereka. Selain itu, dalam implementasinya masih mengalami kendala berupa kurangnya SDM yang mengelola *website* sehingga tidak optimalnya penerapan dasar hukum yang menjadi acuan utama tersebut. Namun,

pemerintah dan masyarakat berpendapat bahwa aturan hukum yang ditampilkan penting, agar informasi hukum dapat dilihat secara transparan.

3. Transparansi



Gambar 6. Representasi Prinsip Transparansi pada Rata-Rata dan Perubahan Hharga di dalam Menu BAPOKTING (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Representasi prinsip transparansi terdapat pada menu "BAPOKTING". Menu ini menampilkan rata-rata harga dan perubahan harga harian berbagai bahan yang dijual pada pasar tradisional Kota Samarinda. Grafik pada tampilan harga menunjukkan keterangan harga naik, turun, atau tetap.

No	Pasar	31 Aug	01 Sep	02 Sep	03 Sep	04 Sep
1	Pasar Pagi	0	0	0	0	0
2	Pasar Segiri	0	0	0	0	0
3	Pasar Merdeka	0	0	0	0	0
4	Pasar Lok Bahu	0	0	0	0	0
5	Pasar Bungkating	0	0	0	0	0
6	Pasar Selayah	0	0	0	0	0
7	Pasar Kincardong	0	0	0	0	0
8	Pasar Palagan	0	0	0	0	0
9	Pasar Kemuning	0	0	0	0	0
10	Pasar Baqa	0	0	0	0	0
11	Pasar Sangaliman	0	0	0	0	0

Gambar 7. Representasi Prinsip Transparansi pada Salah Satu Data Harga pada Rata-Rata dan Perubahan Harga (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Pada menu "BAPOKTING", setiap bahan memiliki rincian harga berupa rata-rata dan perubahan harga dari beberapa pasar tradisional Kota Samarinda dari empat hari terakhir hingga hari ini. Namun, data rincian harga menampilkan data yang kosong atau nol.

Item	Price	Change
Bawang Merah	Rp50.000	Up
Cabe Kuning	Rp40.000	Up
Terung Ayam Broiler	Rp32.000	Up
Cabe Rawit	Rp60.000	Up
Daging Sapi Murni	Rp160.000	Up
Garam Halus 250gr	Rp3.000	Up

Gambar 8. Representasi Prinsip Transparansi pada Submenu Newsboard di dalam Menu Beranda (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada menu "BAPOKTING", representasi prinsip transparansi juga terdapat pada submenu "Newsboard" di dalam menu "Beranda". Menu ini menampilkan informasi harga BAPOKTING dalam bentuk daftar harga bahan harian yang disertai indikator perubahan harga berupa kenaikan, penurunan, dan tetap.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai kurangnya transparansi dalam

penyajian data. Informasi data sudah diupayakan melalui penyajian BAPOKTING. Namun, implementasinya masih belum optimal karena, data yang diunggah tidak lengkap atau mengalami kekosongan data. Sehingga perlu dioptimalkan melalui penambahan SDM yang berfokus pada pengelolaan *website*, agar penyajian data BAPOKTING dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat.

4. Daya Tanggap

No	Nama	Bidang Teknis	Narahubung
1	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Hendari (0823 530 46589)
2	Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Hendari (0823 5304 6589)
3	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Hendari (0823 5304 6589)
4	Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Hendari (0823 5304 6589)
5	Rekomendasi Penarikan / Lokasi / Gangguan Minyak dan Gas Bumi	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Denny Sagita, SE (0811 5855 1073)
6	Rekomendasi Penelitian / Survei Umum	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Edyan Darwihata, S.Sos (0812 5455 9577)
7	Rekomendasi Pembukaan Kantor / Kantor Perwakilan	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Edyan Darwihata, S.Sos (0812 5455 9577)
8	Rekomendasi Pengusahaan Depot Lokal	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Edyan Darwihata, S.Sos (0812 5455 9577)
9	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kontrak Kerja Sama	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Denny Sagita, SE (0811 5855 1073)
10	Rekomendasi Penarikan/ Lokasi / BAB/ SITU Pengusahaan SPBU	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Denny Sagita, SE (0811 5855 1073)

Gambar 9. Representasi Prinsip Daya Tanggap pada Produk dan Layanan
(Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Representasi prinsip daya tanggap terdapat pada menu "Produk dan Layanan". Menu ini menampilkan tabel berupa narahubung dari setiap bidang teknis. Tabel berisikan nama bidang, nama petugas narahubung, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

Gedung Graha Ruhayu Lt. 1 & 2, Jl. Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124, 0541 - 741259 Fax : 748846

Telp: 0541 - 741259

Email: perdagangan.smd@gmail.com

Website: <https://disdag.samarindakota.go.id>

Gambar 10. Representasi Prinsip Daya Tanggap pada Informasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda di bagian bawah *Website* (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada menu "Produk dan Layanan", representasi prinsip daya tanggap juga terdapat pada bagian bawah halaman *website*. Tampilan ini berisikan informasi mengenai kontak resmi Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Informasi mencakup alamat kantor, nomor telepon, fax, alamat email, dan tautan *website* resmi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya daya tanggap yang cepat dan akurat secara *online*. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal, karena kurangnya SDM yang memberikan respon, tidak terdapat mekanisme baku, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga perlu dioptimalkan dengan penyediaan petugas khusus yang memberikan respon secara langsung dan pemberian mekanisme baku yang jelas agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah makin meningkat.

5. Berorientasi pada Kesepakatan

Prinsip berorientasi pada kesepakatan tidak direpresentasikan pada *website* karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian

bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pendapat masyarakat yang membangun dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat perbedaan pandangan yaitu ada yang berpendapat bahwa fitur lebih baik disediakan di dalam *website* dan ada yang berpendapat bahwa lebih baik menggunakan media sosial saja.

6. Keadilan

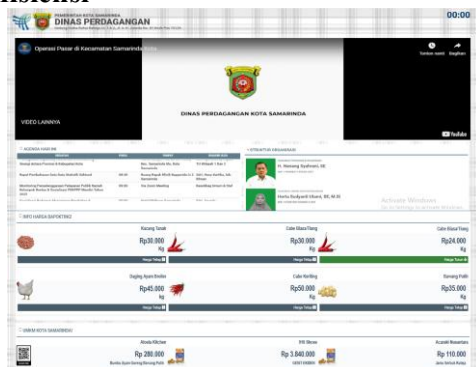


Gambar 11. Representasi Prinsip Keadilan pada Menu Beranda (Sumber: *Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025*)

Representasi prinsip keadilan terdapat pada tampilan menu "Beranda" yang merupakan menu utama pada *website*. Menu ini menghubungkan pada menu utama yaitu Profil, Produk dan Layanan, Berita dan Informasi, Metrologi, PPID Pelaksana, dan BAPOKTING. Selain menu utama, terdapat menu informasi, yaitu BAPOKTING, Kepegawaian, Newsboard, Produk dan Layanan, dan Pusat Oleh-Oleh.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya kemudahan akses bagi publik. Kemudahan akses dapat diupayakan melalui sosialisasi, penyederhanaan tampilan *website*, dan penambahan fitur aksesibilitas. Namun, implementasinya belum optimal, karena lansia mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penambahan fitur aksesibilitas.

7. Efektivitas dan Efisiensi



Gambar 12. Representasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi pada Submenu Newsboard di dalam Menu Beranda (Sumber: *Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025*)

Representasi prinsip efektivitas dan efisiensi terdapat pada submenu "Newsboard" di dalam menu "Beranda". Submenu ini menyediakan informasi penting, seperti Video Kegiatan Dinas, Agenda Dinas, Struktur Organisasi dan Laporan Harga BAPOKTING.

Kategori "Artikel"



Gambar 13. Representasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi pada Kategori Berita di dalam Menu Berita dan Informasi (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada submenu "Newsboard" di dalam menu "Beranda", representasi prinsip efektivitas dan efisiensi juga terdapat pada menu "Berita dan Informasi" yang menampilkan kategori berita yaitu artikel, berita daerah, berita nasional, rapat koordinasi, dan siaran pers. Menu ini menampilkan berbagai berita dan laporan kegiatan informasi perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang sama bahwa *website* merupakan wadah penyebaran informasi publik yang cepat dan mudah diakses. Namun, implementasinya masih belum optimal. *Website* dianggap efektif karena pengunggahan data melalui tahapan verifikasi sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi. Namun, *website* belum efisien karena masih sering mengalami keterlambatan dalam pengunggahan data dan masih sering mengalami kekosongan data. Faktor utama disebabkan kurangnya SDM, sehingga diperlukannya SDM khusus dalam pengelolaan *website*.

8. Akuntabilitas

Profil Tahunan Dinas

Show 10 entries		Search:		
No	Nama File	Tanggal Upload	Oleh	Download
1	Paparan Satu Data Kemiskinan_Kadis Kominfo	28 November 2023	Noviyanto Rahmadi	83 Kali
2	renstra-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-tahun-2021-2026-UNOd7qVB3I_IOWn	28 November 2023	Noviyanto Rahmadi	91 Kali

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous Next

Gambar 14. Representasi Prinsip Akuntabilitas pada Submenu Informasi Publik di dalam Menu PPID Pelaksana (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Representasi prinsip akuntabilitas terdapat pada submenu "Informasi Publik" dalam menu "PPID Pelaksana". Submenu ini menampilkan dokumen seperti Profil Tahunan Dinas, Paparan Data, serta Dokumen Perencanaan Strategis yang dapat diunduh oleh publik.

BAWANG MERAH						
No	Pasar	31 Aug	01 Sep	02 Sep	03 Sep	04 Sep
1	Pasar Pagi	0	0	0	0	0
2	Pasar Segiri	0	0	0	0	0
3	Pasar Merdeka	0	0	0	0	0
4	Pasar Lok Bahu	0	0	0	0	0
5	Pasar Bengkuring	0	0	0	0	0
6	Pasar Ijabah	0	0	0	0	0
7	Pasar Kedondong	0	0	0	0	0
8	Pasar Palaran	0	0	0	0	0
9	Pasar Kemuning	0	0	0	0	0
10	Pasar Baqa	0	0	0	0	0
11	Pasar Sungaidama	0	0	0	0	0

Gambar 15. Representasi Prinsip Akuntabilitas pada Data di dalam Menu BAPOKTING (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada submenu 'Informasi Publik' dalam menu 'PPID Pelaksana'. Representasi prinsip akuntabilitas juga terdapat pada menu "BAPOKTING" yang berisikan penyajian data BAPOKTING dengan menampilkan harga bahan di berbagai pasar tradisional. Namun, tabel data harga menampilkan angka nol pada beberapa tanggal menunjukkan adanya keterlambatan atau kendala dalam proses pembaruan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki kesamaan pandangan bahwa akuntabilitas sudah diupayakan melalui penyajian informasi publik. Namun pemerintah dan masyarakat sepakat bahwa implementasinya belum berjalan optimal karena masih menghadapi kendala internal dan teknis yang menghambat keakuratan serta konsistensi informasi. Sehingga perlu dilakukan penguatan sistem evaluasi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan fitur aksesibilitas publik.

9. Visi Strategis

VISI KOTA SAMARINDA

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Berdasarkan Visi Kepala Daerah, selanjutnya dijabarkan Misi Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Samarinda Dinas perdagangan menunjang Misi Kedua yaitu :

"Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan"

Gambar 16. Representasi Prinsip Visi Strategis pada Submenu Visi dan Misi di dalam Menu Profil (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Representasi prinsip visi strategis terdapat pada submenu "Visi dan Misi" dalam menu "Profil". Visi dan misi mencerminkan arah kebijakan dan orientasi jangka panjang. Visi berupa "Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban" serta misi "Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan, dan Berkeadilan".

VISI PPID

Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

MISI PPID

1. Menyediakan informasi publik yang akuntabel
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola layanan informasi publik
4. Meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Gambar 17. Representasi Prinsip Visi Strategis pada Submenu Visi Misi di dalam Menu PPID Pelaksana (Sumber: *Website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2025)

Selain pada submenu "Visi dan Misi" dalam menu "Profil", representasi prinsip visi strategis juga terdapat pada submenu "Visi Misi" di dalam menu "PPID Pelaksana". Submenu ini berisikan visi "Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban", serta empat misi utama yang menekankan pada penguatan akuntabilitas, pengembangan sistem pelayanan informasi publik, peningkatan kualitas SDM, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa interpretasi pemerintah dan masyarakat memiliki kesamaan pandangan, bahwa keberadaan *website* merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital dan mewujudkan tata kelola perdagangan yang transparan, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Namun, terdapat kelemahan, yaitu belum optimalnya implementasi akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya upaya penguatan aksesibilitas serta edukasi atau sosialisasi kepada publik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1).Partisipasi direpresentasikan melalui penyediaan formulir pengaduan. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat; (2).Aturan hukum direpresentasikan melalui penyajian dasar hukum. Aturan hukum telah dipublikasikan sesuai kewajiban, serta dijalankan sesuai aturan. Namun, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan informasi hukum; (3).Transparansi direpresentasikan melalui penyajian data harga BAPOKTING sebagai kebutuhan utama dalam pengawasan pasar. Namun, data sering mengalami kekosongan dan keterlambatan pengunggahan; (4).Daya tanggap direpresentasikan melalui informasi kontak narahubung serta melalui informasi tentang Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Namun, masih terkendala pada keterbatasan SDM dan ketiadaan prosedur baku sehingga implementasinya masih belum optimal; (5).Berorientasi pada kesepakatan belum direpresentasikan karena, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, media sosial dianggap lebih efektif dan efisien sebagai ruang diskusi; (6).Keadilan direpresentasikan melalui tampilan utama sebagai navigasi awal penghubung berbagai menu dan fitur.

Namun, aksesibilitas belum merata karena keterbatasan yang dialami masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat digital; (7).Efektivitas dan efisiensi direpresentasikan melalui penyebaran informasi tentang perdagangan yang mudah dicari. Namun, data yang disajikan sering tidak tersedia atau lambat dalam pengunggahan; (8).Akuntabilitas direpresentasikan melalui penyajian data yang dapat diakses publik. Namun, belum terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi baku, sementara masyarakat menilai data sering tidak sesuai dengan kondisi aktual; (9).Visi strategis telah direpresentasikan dengan menampilkan visi dan misi yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan. Namun, implemenasinya belum optimal.

Saran/Rekomendasi

Penelitian ini memiliki saran, yaitu: (1). Perlu dilakukan upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan *website* Dinas Perdagangan Kota Samarinda; (2). Perlu dibuat mekanisme baku seperti SOP agar pengelolaan *website* lebih terstruktur; (3).Perlu ditambahkan SDM yang kompeten dalam mengelola *website* agar implemenasinya lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Aksenta, Almasari, dkk. 2023. *Literasi Digital: Pengetahuan Dan Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azis, Sholecul. 2012. *Sekali Baca Langsung Inget Membuat Website Gratis Dalam Sekejap Tanpa Guru: Mudah Dipraktikkan dan Langsung Bisa*. Jakarta: Kunciom.
- Candra, M.Arfa Andika, dan Ika Arthalia Wulandari. 2021. Sistem Informasi Berbasis Web pada SMP Negeri 7 Kota Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer (JMIK)*, 1(1), 175-189.
- Danar, Oscar Radyan. 2022. *Teori Governance*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Fatimah. 2020. *Semiotika dalam Kajian Iklan Layanan Masyarakat (ILM)*. Gowa: TallasaMedia.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Indonesia. 2003. *Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indrajit, Richardus Eko. 2022. *Electronic Government*. Jakarta: PREINEXUS.
- Ilham. 2021. *E-Governance*. Yogyakarta: Deepublish.

- Khairudin, dkk. 2021. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Banyumas: CV Amerta Media.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mangindaan, Joanne V. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip-Good Governance*. Manado: Unsrat Press.
- Napitulu, Darmawan, dkk. 2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pambudi, Fivin Bagus Septiya. 2023. *Buku Ajar Semiotika*. Jepara: UNISNU Press.
- Rorong, Michael Jibrael. 2024. *Semiotika*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Sulianta, Feri. 2024. *Semiotika Digital*. Bandung: Feri Sulianta
- Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda dengan domain <https://disdag.samarindakota.go.id/>